



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Pelabuhan No. Telp. (0742) 21238
KUALA TUNGKAL

BERITA ACARA KESEPAKATAN

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami tim evaluasi sakin Irbn Wil II berdasarkan surat Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 061/2554/Org perihal tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2021.

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, LHE nomor 700/1156/lsp Tanggal 01 November 2021, , Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memperoleh nilai 50,44 % dengan ketegori **CC**. dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30 %	19,56
B	Pengukuran Kinerja	25 %	10,31
C	Pelaporan Kinerja	15 %	7,73
D	Evaluasi Kinerja	10 %	4,50
E	Pencapaian Kinerja	20%	8,35
	Jumlah	100 %	50.44

Setelah dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Dokumen tindak lanjut terlampir) nilai Evaluasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengalami perubahan nilai menjadi 60,24 % dengan ketegori **B**. dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30 %	19,71 %
B	Pengukuran Kinerja	25 %	16,25 %
C	Pelaporan Kinerja	15 %	10,69%
D	Evaluasi Kinerja	10 %	2,84 %
E	Pencapaian Kinerja	20%	10,75 %
	Jumlah	100 %	60,24 %



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan : Pelabuhan No. Email: Inspektorattanjabbarat@gmail.com
KUALA TUNGKAL

Kuala Tungkal, 1 Nopember 2021

Nomor : LHE-700/ 1156 /lsp
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Satpol PP
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
di -
Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- g. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 094/4125/SPT/2021 tentang Evaluasi SAKIR Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, dari tanggal 22 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021.

2. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 22 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021.

3. Tim Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2021

Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2021 dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Tujuan Evaluasi

- Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Menilai tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

5. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Internal; dan
- Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) Tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) periode 2021 s.d 2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, serta dokumen terkait lainnya.

6. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100, yang selanjutnya diberikan "Kategori Peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja.
4	B	> 60 – 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja.
6	C	> 30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja

			tapi perlu ditingkatkan.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh nilai sebesar **60,24** dengan kategori **B**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di Lingkungan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Kinerja	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
A	Perencanaan Kinerja	30%	23,76
B	Pengukuran Kinerja	25%	13,75
C	Pelaporan Kinerja	15%	9,88
D	Evaluasi Internal	10%	4,50
E	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20%	8,35
	Jumlah	100%	60,24

Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

1. Implementasi renstra

- Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

B. Pengukuran Kinerja

1. Kualitas Pengukuran

- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
- Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi

2. Implementasi Pengukuran

- IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
- IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- Target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
- IKU belum sepenuhnya direviu secara berkala
- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

C. Pelaporan Kinerja

1. Penyajian Informasi Kinerja

- Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan
- Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
- Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan

2. Pemanfaatan Informasi Kinerja

- Informasi kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan informasi yang memadai/belum menyeluruh untuk perbaikan perencanaan;
- Informasi kinerja belum sepenuhnya dengan informasi yang memadai/belum menyeluruh untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
- Informasi kinerja belum sepenuhnya untuk perbaikan kinerja;
- Informasi kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan informasi yang memadai/belum menyeluruh untuk penilaian kinerja.

D. Evaluasi Internal

1. Pemenuhan Evaluasi

- Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum sepenuhnya dilakukan.
- Hasil evaluasi atas rencana aksi belum sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Kualitas Evaluasi

- Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
- Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
- Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode

3. Pemanfaatan Evaluasi

- Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;
- Hasil evaluasi rencana aksi secara tertulis belum ada ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

- Target belum sepenuhnya dicapai
- Capaian kinerja belum lebih baik dari tahun sebelumnya
- Informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan

7. Tindaklanjut dari Rekomendasi Tahun Sebelumnya

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja belum menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya.

8. Rekomendasi

Kami merekomendasikan kepada **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat** agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan Kinerja Tahunan

c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

- Rencana kinerja tahunan agar dapat dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran

B. Pengukuran Kinerja

1. Kualitas Pengukuran

- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) seluruh target yang ada dalam rencana aksi telah diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/semester).
- Pengukuran kinerja yang agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi dengan melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat

2. Implementasi Pengukuran

- IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran alat ukur tercapainya outcome atau hasil hasil program yang ditetapkan dalam dokumen RKA
- IKU agar dimanfaatkan untuk penilaian kinerja Dimanfaatkan untuk penilaian kinerja memenuhi kriteria sbb:

- a) Capaian IKU dijadikan dasar penilaian kinerja
 - b) Capaian IKU dijadikan dasar reward atau punishment
 - c) Capaian IKU dijadikan dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat
- Target kinerja eselon III dan IV agar dimonitor pencapaiannya, terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik, terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring kinerja secara periodic, hasil monitoring dan tindak lanjut atas hasil monitoring
 - Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan reward dan punishment dibuat surat edaran Kepala Dinas tentang mekanisme pengumpulan data kinerja yang mengatur pengukuran data kinerja secara berjenjang mulai dari eselon IV s.d eselon II dengan menggunakan E- Sakip Tanjab barat. Hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas dan untuk menentukan reward & punishment.
 - IKU agar sepenuhnya direviu secara berkala
 - Pengukuran kinerja atas rencana aksi agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja, ditindaklanjuti untuk mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran

C. Pelaporan Kinerja

1. Penyajian Informasi Kinerja

- Laporan Kinerja agar sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan
- Laporan Kinerja agar sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Laporan Kinerja agar sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
- Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja agar sepenuhnya dapat diandalkan datanya valid, dapat ditelusuri kesumber datanya, diperoleh dari sumber yang kompeten, dapat diverifikasi, serta konsisten

2. Pemanfaatan Informasi Kinerja

- Informasi yang disajikan agar digunakan dalam perbaikan perencanaan Laporan Kinerja yang disusun sampai dengan saat ini telah berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.

- Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur
- Informasi kinerja agar dilengkapi dengan informasi untuk penilaian kinerja artinya: informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment

D. Evaluasi Internal

1. Pemenuhan Evaluasi

- Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi agar dilakukan dengan kriteria terdapat informasi tentang capaian hasil-hasil rencana atau agenda, simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda, adanya analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda, terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda
- Hasil evaluasi agar sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

2. Kualitas Evaluasi

- Evaluasi program agar sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
- Evaluasi program agar sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Evaluasi program agar sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Pemantauan Rencana Aksi agar dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
- Pemantauan Rencana Aksi agar memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
- Hasil evaluasi Rencana Aksi agar sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode

3. Pemanfaatan Evaluasi

- Hasil evaluasi program agar sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;
- Hasil evaluasi rencana aksi secara tertulis agar ada ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

- Target agar sepenuhnya dicapai
- Capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya

- Informasi mengenai kinerja agar dapat diandalkan. dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid;
 - b) Dihasilkan dari sumber2 atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten);
 - c) Dapat ditelusuri sumber datanya;
 - d) dapat diverifikasi
 - e) up to date

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan)
2. Arsip

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TAJURUNG JARUNG BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2020**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	3	SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	CATATAN
			Y	Nilai		
1	2		3	4	5	6
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)						
	I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	78,19%	23,78		
	a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	100,00%	2,00		
1	Renstra (SKPD) telah disusun		Y	1,00		
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK	
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00	OK	
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK	
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK	
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK	
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK	
8	Renstra telah menyajikan RKU		A	1,00	OK	
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK	
	b. KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	78,13%	3,91		
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK	
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		B	0,75	OK	
12	Sasaran telah berorientasi hasil		B	0,75	OK	
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK	
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	OK	
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75	OK	
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75	OK	
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75	OK	
	c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	75,00%	2,25		
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75	OK	
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75	OK	
20	Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala		B	0,75	OK	
	II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	78,00%	15,60		
	a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00%	4,00		
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00		
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK	
3	PK telah menyajikan RKU		A	1,00	OK	
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK	
	b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	80,00%	8,00		
5	Sasaran telah berorientasi hasil		B	0,75	OK	
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK	
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	OK	
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0,75	OK	
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		B	0,75	OK	
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0,75	OK	
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/ugas fungsi)		B	0,75	OK	
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK	
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		B	0,75	OK	
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen mnc setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK	
	c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	60,00%	3,60		
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-	OK	
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur ketercapaian		B	0,75	OK	
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK	
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pencapaiannya hasil		B	0,75	OK	
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75	OK	
	B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	25,00	87,60%	21,90		
	I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	87,60%	4,38		
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00		
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		B	0,75		
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		B	0,75	OK	
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK	

II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)				12,50	60,00%	7,50		
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		B	0,75	OK			
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		B	0,75	OK			
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75	OK			
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK			
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK			
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK			
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK			
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK			
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-	OK		apabila seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi telah diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-	OK		apabila Kam/PHD telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bankan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diderivikasi secara lebih tepat dan cepat	
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)				7,50	25,00%	1,88		
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0,50	OK		IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan	
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		C	-	OK		apabila hasil pengukuran IKU tidak berdampak apapun bagi kinerja	
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		C	-	OK		apabila target kinerja telah dimonitor dengan kriteria tersebut namun tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan	
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		C	0,50	OK		Jika 10% < pejabat yg meniali keterkaitan capaian dengan reward & punishmentnya < 50%	
19	IKU telah direvisi secara berkala		C	0,50	OK		apabila IKU telah direvisi	
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pendendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		C	-	OK		apabila hasil pengukuran RA tidak diindaklanjuti	
C. PELAPORAN KINERJA (15%)				15,00	65,89%	9,88		
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)				3,00	93,75%	2,81		
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00				
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK			
3	Laporan Kinerja telah di upload ke dalam website		Y	1,00	OK			
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75	OK			
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)				7,50	58,29%	4,37		
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0,75	OK			
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75	OK			
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75	OK			
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diadukan		C	0,50	OK		apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan perbandingan Realisasi vs Target dan Kinerja tahun berjalan vs kinerja tahun sebelumnya;	
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33	OK		Jika hanya berupa info tentang upaya efisiensi yang dilakukan	
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		C	0,50	OK		apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi keuangan atas > 50% sasaran;	
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0,50	OK		apabila 10% < keabsahan data realisasi kinerja < 40%	
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)				4,50	60,00%	2,70		
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK			
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		C	0,50	OK			
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		C	0,50	OK			
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		C	0,50	OK			
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,50	OK			
D. EVALUASI INTERNAL (10%)				10,00	44,95%	4,50		
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)				2,00	71,00%	1,42		
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan		Y	1,00				
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00				
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		C	0,34	OK		pemantauan rencana aksi dilakukan periodik tahunan	
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		C	0,50	OK		apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan)	
II. KUALITAS EVALUASI (8%)				5,00	39,00%	1,96		
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		C	0,50	OK		evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program (tanpa ukuran keberhasilan program masih belum jelas)	
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK		apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinerja dan 60% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan;	
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK		apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan peningkatan kinerja dan 60% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan;	
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		D	0,25	OK		apabila evaluasi atas Rencana aksi telah dilakukan secara tahunan;	
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		D	0,25	OK		Jika tidak terdapat penilaian dan tidak ada alternatif yang diberikan	
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		C	0,34	OK		Jika setiap semester menunjukkan perbaikan	
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)				3,00	37,50%	1,13		

11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		C	0,50	OK	Jika 40% < Indekstertup rekomendasi yang telah dengan perencanaan < 75%
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		D	0,25	OK	Jika 10% < rekomendasi yang ditindaklanjuti < 40%
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)						
KINERJA YANG LAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		20,00	41,78%			
1	Target dapat dicapai	7,50	33,33%	2,50		
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	1,00		apabila 40% < rasio capaian kinerja < 50%
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	0,50		apabila 50% < rasio capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya < 110%
4	Target dapat dicapai			1,00		apabila lebih dari 50% capaian output memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan
5	Capaian kinerja lebih baik dan tahun sebelumnya			1,50		
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			1,25		
KINERJA YANG LAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,00	117,90%	5,88		
4	Target dapat dicapai			3,10		
5	Capaian kinerja lebih baik dan tahun sebelumnya			1,50		
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			1,25		
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	60,24%	60,24		

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

M. H. HADI, A.Md
NIP. 1964041014

Disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

SATUAN
POLISI HENANG SURYA MM
NIP. 196504191195121001

Tim Evaluator SAKIP

: Drs. Rahmus
NIP. 197110131 199403 1 004

: Noomalasari, ST
NIP. 19820619 201101 2 008

: Zully Holidi Yenti, SE
NIP. 19771119 200904 2 002

: H.N. Janti, HK
NIP. 19840526 198603 1 013

: Andi Asmara, SE
NIP. 19771008 201101 1 001

: Dewi Yustisi Okladina, SP
NIP. 19861018 201001 2 013

: Ahmad Ridwan, A. Md
NIP. 19760804 2007011023

: Bahrudin
NIP. 19820216 200701 1 007

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KONTEKS
KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'Y/T'
KETIK 'A' ATAU 'B' ATAU 'C' ATAU 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'A'
UNTUK PERTANYAAN E-4-16 JAWABAN DITULIS PADA KKE-1-I, KKE-1-II, DAN KKE-1-III